

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI UTARA*****ANALYSIS OF EFFECTIVENES AND EFFICIENCY BUDGET IN DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINCE SULAWESI UTARA***

Oleh:

**Immanuel Pangkey¹
Sherly Pinatik²**^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manadoemail: 1imanuelpangkey@yahoo.com
2Sherlypinatik23@gmail.com

Abstrak: Anggaran memiliki peranan penting dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Menyusun anggaran dari setiap program organisasi dapat menjadi tugas yang cukup berat dan membebani. Namun demikian, hal ini sangat penting bagi suatu organisasi yang merupakan cara untuk merencanakan dan memastikan bahwa sebuah organisasi telah mengalokasikan sumber dayanya dengan baik. Tujuan finansial tentunya memiliki keterkaitan dengan faktor anggaran belanja dan pendapatan pada setiap organisasi yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, periode anggaran 2010-2014. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis data perhitungan pengukuran efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian untuk tingkat efektivitas pada tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efektif dan tingkat efisiensi dari tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efisien. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi sebaiknya meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran belanja, dibutuhkan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun swasta serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan maupun perencanaan anggaran.

Kata kunci: *anggaran, pendapatan, belanja, pemerintah*

Abstract: *Budgeting has the important in the organization either government organization or the public organization. To set the budget every program of an organization would be so tough and difficult. But this thing is necessary to an organization which constitute way plan and make sure that organization has been allocated its resources properly. Financial objective definitely has the relation with the budget factors and the revenue to every organization. This research objective is to know the effectivity and efficiency of budgeting in Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Province Sulawesi Utara, to bugeting 2010-2014 period. Data analysis methods that used is descriptive analysis and effectivity and efficiency measurement data. The result of this research come out totally not effective in 2010-2014 period. Level of efficiency from 2010-2014 period shows contrary that the result over all is not efficient. Therefore in order to improve the effectiveness and efficiency of budget spending in Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Province Sulawesi Utara, then need good coordination with local government and private sector and communities in the implementation of policies, programs and bidget planning activities*

Keywords: *budgeting, income, expense, government*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Efek dari krisis yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini menyebabkan pemerintah di negara-negara seluruh dunia memperbaiki proses mereka dalam hal performa daya guna dan efisiensi perekonomian. Dalam pengertian ini analisa perbandingan dari efisiensi sektor publik adalah poin awal dalam mempelajari peran atau tugas dari efisiensi, efektivitas dan performa yang berhubungan dengan perekonomian pemerintahan dari penggunaan sumber daya oleh manajemen publik untuk mendapatkan keobyektifan dari pemulihan ekonomi dan kepentingan pengembangan perekonomian nasional pada jangka menengah dan jangka panjang. (Mihaiu, Opreana, Cristescu, 2010).

Pada umumnya setiap perusahaan berupaya seoptimal mungkin mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam kegiatan perusahaan, semua bagian seperti pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan akan menjadi satu kesatuan kerja yang harus saling mendukung dalam proses pencapaian tujuan. Untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuannya, maka setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk menyusun strategi-strategi sebagai petunjuk dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerjanya. (Julita, 2011).

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran. (Julita, 2011).

Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran penting dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik, menuntut setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya *good public* dan *good governance*. (Tamasoleng, 2015).

Pengendalian keuangan sangat penting dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara yaitu agar supaya anggaran belanja yang di tetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Perda, Pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan bagi daerah dari dana hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah provinsi mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain. Kebijakan penggunaan semua dana diserahkan semuanya kepada pemerintah tersebut sesuai dengan dana yang ada.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi anggaran belanja daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya. Wiratna, (2015 : 1)

Akuntansi sektor publik di Indonesia pada berbagai bidang yakni sebagai berikut.

1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah

3. Akuntansi Desa
4. Akuntansi Tempat Ibadah: Masjid, Gereja, Pura, Wihara
5. Akuntansi LSM (Lembaga Sosial Masyarakat).
6. Akuntansi Yayasan
7. Akuntansi Pendidikan: Sekolah, Perguruan Tinggi
8. Akuntansi Kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum dalam (Hariadi, Restianto, dan Bawono, 2010:115). Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Dalam akuntansi sektor publik sendiri dikenal akuntansi pemerintahan, dalam akuntansi pemerintahan ini data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Karena akuntansi keuangan pemerintah menghasilkan informasi bagi pihak intern maupun ekstern pemerintah, sehingga dapat digolongkan sebagai akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan direncanakan, diorganisasikan, serta dijalankan atas dasar dana.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi Keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan berupa laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah. Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Akuntansi Keuangan Daerah, pemerintahan daerah berkewajiban menyusun sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem akuntansi pemerintahan daerah tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 234 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah (kabupaten/kota) dilaksanakan oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah yang bersangkutan untuk menyelenggarakan akuntansi yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan sistem akuntansi untuk satuan-satuan kerja dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).

Pengertian Anggaran

Mardiasmo (2009:61), mendefinisikan anggaran merupakan penyertaan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Pengertian Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2009:62) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Sumarsono (2009:57) penganggaran merupakan suatu proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai politik. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Akuntansi Belanja

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2010) mendefinisikan akuntansi belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan

menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP, GU, TU, dan akuntansi belanja LS. UP atau uang persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*). Setiap SKPD biasanya akan mendapatkan UP diawal tahun anggaran dari Bendahara Umum Daerah. Belanja yang dilakukan oleh SKPD menggunakan uang persediaan ini dicatat dalam buku jurnal khusus belanja dengan mendebet akun belanja yang sesuai dan mengkredit Kas di Bendahara Pengeluaran. Secara periodik, Bendahara Pengeluaran SKPD akan membuat SPJ Pengeluaran dan mengajukan Surat Permintaan (SPP) GU (Ganti Uang), yaitu penggantian uang persediaan.

Belanja daerah dibagi menurut fungsi, urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan perincian objek belanja. Akuntansi belanja pada satuan kerja meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan), GU (ganti uang), dan akuntansi belanja LS (langsung). Bukti transaksi yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D), Nota debet Bank, dan Bukti Transaksi Kas lainnya yang dalam penyajiannya harus dilengkapi dengan SPM/SPD/Kuitansi pembayaran dan/atau bukti tanda terima barang/jasa.

Belanja daerah digunakan dalam menandai pelaksanaan urusan penerimaan yang terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka menandai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung

- a. **Anggaran Belanja Langsung**
Anggaran belanja langsung, yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Jenis Belanja Langsung dapat berupa Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.
- b. **Anggaran Belanja Tidak Langsung**
Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis Belanja Tidak Langsung dapat berupa Belanja Pegawai/Gaji Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas (Muttaqinhasyim, 2010)

Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009:132) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Efisiensi

Mardiasmo (2009:132) efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.

Penelitian Terdahulu

1. Lomboan (2014) dengan judul Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis anggaran belanja langsung pada tahun 2010-2013. Metode yang digunakan adalah metode Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran

- 2013 menunjukkan kinerja yang baik dikarenakan ada hasil negatif yang menunjukkan bahwa adanya penghematan penggunaan realisasi anggaran atau dikatakan selisih wajar *favourable variance*.
2. Julita (2011) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Utara. Metode yang digunakan adalah metode Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan badan lingkungan hidup provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009-2012 (BLH PROVSU) secara umum dapat dikatakan sudah baik dan kinerja belanja pada badan lingkungan hidup provinsi Sumatra utara (BLH PROVSU) dilihat dari analisis varians secara umum juga dapat dikatakan sudah baik.
 3. Tamasoleng (2015) dengan judul Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Metode yang digunakan adalah metode Analisis Deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari hasil pengamatan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja belum dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa bahan keterangan dalam bentuk uraian kata-kata dan tidak diukur dalam skala numerik berupa data tentang peraturan pemerintah mengenai standar akuntansi pemerintahan, peraturan daerah dan penganggaran belanja pemerintah, sedangkan data kuantitatif berupa Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat Jl. WR. Supratman No.72 Manado. Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Mei 2015

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Penggunaan Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu penelitian langsung di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yakni :

- a. Peninjauan langsung (observasi), yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis langsung ke lokasi instansi pemerintah dan mengamati kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah tersebut.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tatap muka dan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab pada masalah yang diteliti.
- c. Pengamatan prosedur-prosedur atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan instansi pemerintah.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu data atau keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan dengan teori.

Analisis data dimulai dengan:

1. Halim Abdul (2008) mengemukakan analisis perhitungan tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

Rumus pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Target anggaran belanja langsung}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini tingkat efektivitas dihitung dari tahun 2005-2010. Perhitungan potensi anggaran belanja dengan cara pengkalian total anggaran belanja dengan tarif anggaran belanja sehingga ditemukan jumlah anggaran belanja dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.

- Halim Abdul (2008) mengemukakan analisis tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pengeluaran dengan realisasi anggaran belanja yaitu diterima.

Rumus pengukuran efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Target anggaran belanja tidak langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja tidak langsung}} \times 100$$

Metode Pengumpulan Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Kuncoro (2009:145) menyatakan jenis data dapat dibedakan menjadi:

- Data Kuantitatif, adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).
- Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar data dapat diproses lebih lanjut.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah:

- Mempelajari pos-pos anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengadakan Tanya jawab dengan manajemen/pejabat Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
- Mempelajari efektivitas dan efisiensi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
- Mempelajari cara penyusunan anggaran belanja yang baik dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengadakan perbandingan antara penyusunan anggaran pendapatan dengan anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Realisasi anggaran belanja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel 1 dan 2.

Tabel. 1 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

Tahun	Target	Realisasi
2010	4.649.040.000	3.795.976.756
2011	7.475.000.000	6.466.550.626
2012	12.616.000.000	9.487.728.502
2013	24.916.193.758	21.989.738.699
2014	26.570.544.750	22.673.149.326

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 2. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

No	Tahun	Target Anggaran Belanja Tidak Langsung	Realisasi
1	2010	9.654.812.770	9.546.409.638
2	2011	11.233.486.000	10.219.511.139
3	2012	10.719.855.000	10.475.971.550
4	2013	10.836.121.307	10.559.909.312
5	2014	10.597.930.000	10.330.610.000

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

Analisis dan Perhitungan Efektivitas

Halim Abdul (2008) mendefinisikan efektivitas diartikan menggambarkan kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam merealisasikan anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill pemerintah. Tingkat efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan yang dilihat dalam tabel 5 dan tingkat efektivitas dihitung dari tahun 2010-2015.

Tingkat efektivitas digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

- Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- Hasil perbandingan tingkat pencapaian 99% sampai 91% berarti sangat efektif.
- Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 90% berarti tidak efektif.

Tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dihitung dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Target anggaran belanja langsung}} \times 100\% \\ \text{Tahun 2010} &= \frac{3.795.976.756}{4.649.040.000} \times 100\% = 81,65 \\ \text{Tahun 2011} &= \frac{6.466.550.626}{7.475.000.000} \times 100\% = 86,50 \\ \text{Tahun 2012} &= \frac{9.487.728.502}{12.616.000.000} \times 100\% = 75,20 \\ \text{Tahun 2013} &= \frac{21.989.738.699}{24.916.193.758} \times 100\% = 88,25 \\ \text{Tahun 2014} &= \frac{22.673.149.326}{26.570.544.750} \times 100\% = 85,33 \end{aligned}$$

Tabel 3 menggambarkan perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Utara.

Tabel 3. Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Langsung Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2014.

No	Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
1	2010	4.649.040.000	3.795.976.756	81,65	Tidak Efektif
2	2011	7.475.000.000	6.466.550.626	86,50	Tidak Efektif
3	2012	12.616.000.000	9.487.728.502	75,20	Tidak Efektif
4	2013	24.916.193.758	21.989.738.699	88,25	Tidak Efektif
5	2014	26.570.544.750	22.673.149.326	85,33	Tidak Efektif

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara (Data Olahan)

Tabel 3 dapat dilihat tingkat efektivitas anggaran belanja langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2010 tingkat efektivitas 81,65% (Tidak Efektif). Kemudian ditahun selanjutnya 2011, tingkat efektivitas mengalami kenaikan menjadi 86,50% (Tidak Efektif). Selanjutnya pada tahun 2012 merupakan tahun yang tingkat efektivitasnya terendah selama kurun waktu 2010-2014 dengan tingkat efektivitas 75,20% (Tidak Efektif). Selanjutnya di tahun 2013 menjadi tahun yang tingkat efektivitasnya tertinggi selama kurun waktu 2010-2014 yaitu 88,25% (Tidak Efektif). Dan di tahun terakhir 2014 tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 85,33% (Tidak Efektif).

Analisis dan Perhitungan Efisiensi

Pengukuran efisiensi anggaran belanja dilakukan dengan membagi biaya pengeluaran anggaran belanja tidak langsung dengan total realisasi anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung.

Tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dihitung dengan membandingkan total anggaran belanja langsung dan tidak langsung dan realisasi anggaran belanja yang dapat dilihat dalam tabel 4.

pengukuran efisiensi:

1. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien.
2. Apabila hasilnya antara 21% sampai dengan 85% berarti efisien.
3. Apabila hasilnya > 85% berarti tidak efisien.

Rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Target anggaran belanja tidak langsung}}{\text{Realisasi dan Anggaran Belanja Tidak Langsung}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 5.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2010} &= \frac{9.654.812.770}{9.546.409.638} \times 100\% = 101,13 \\ \text{Tahun 2011} &= \frac{11.233.486.000}{10.219.511.139} \times 100\% = 109,92 \\ \text{Tahun 2012} &= \frac{10.719.855.000}{10.475.971.550} \times 100\% = 102,32 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{10.836.121.307}{10.559.909.312} \times 100\% = 102.61 \\ \text{Tahun 2014} &= \frac{10.597.930.000}{10.330.610.000} \times 100\% = 102.58 \end{aligned}$$

Tabel 4. Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2014.

No	Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung	Target	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1	2010	9.654.812.770	9.546.409.638	101,13	Tidak Efisien
2	2011	11.233.486.000	10.219.511.139	109.92	Tidak Efisien
3	2012	10.719.855.000	10.475.971.550	102.32	Tidak Efisien
4	2013	10.836.121.307	10.559.909.312	102.61	Tidak Efisien
5	2014	10.597.930.000	10.330.610.000	102.58	Tidak Efisien

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara (Data Olahan)

Tabel 4 efisiensi anggaran belanja di dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dari periode 2010 sampai 2014 tingkat efisiensi anggaran belanja keseluruhannya Tidak Efisien. Tahun 2010, tingkat efisiensi ditahun ini sebesar 101,13% (Tidak Efisien). Pada tahun 2011, tingkat efisiensi sebesar 109.92% (Tidak Efisien). Selanjutnya pada tahun 2012, tingkat efisiensi sebesar 102.32% (Tidak Efisien). Lalu pada tahun 2013, tingkat efisiensi sebesar 102.61% (Tidak Efisien). Dan ditahun 2014, tingkat efisiensi sebesar 102.58% (Tidak Efisien).

Pembahasan

Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Hasil perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2010 tingkat efektivitas 81,65% (Tidak Efektif). Kemudian ditahun selanjutnya 2011, tingkat efektivitas mengalami kenaikan menjadi 86,50% (Tidak Efektif). Selanjutnya pada tahun 2012 merupakan tahun yang tingkat efektivitasnya terendah selama kurun waktu 2010-2014 dengan tingkat efektivitas 75,20% (Tidak Efektif). Di tahun 2013 menjadi tahun yang tingkat efektivitasnya tertinggi selama kurun waktu 2010-2014 yaitu 88,25% (Tidak Efektif). Dan di tahun terakhir 2014 tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 85,33% (Tidak Efektif).

Tingkat efektivitas anggaran belanja terus berfluktuasi dari tahun ketahun, kadang mengalami peningkatan kadang mengalami penurunan. Naik turunnya tingkat efektivitas anggaran belanja disebabkan dimana realisasi anggaran yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu pengeluaran anggaran belanja tidak tepat waktu dalam pembiayaan anggaran belanja. Dari masalah yang ditimbulkan ini, solusi agar supaya tingkat efektivitas anggaran belanja bisa efektif, harus adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara setiap bidang-bidang dan para tenaga kerja agar dapat merealisasikan target anggaran dari perencanaan setiap program. Agar dapat merealisasikan target anggaran dari setiap program, harus adanya pengawasan yang baik atas penyusunan program dan anggaran dari manajemen Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata agar keseluruhan perencanaan dari setiap program dan penganggarannya bisa terealisasi sesuai target yang direncanakan, pengawasan ini berguna untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan agar perencanaan program dapat segera diperbaiki dan disusun secara akurat.

Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dari hasil perhitungan efisiensi anggaran belanja di dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dari periode 2010 sampai 2014 efisiensi anggaran belanja di dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dari periode 2010 sampai 2014 tingkat efisiensi anggaran belanja keseluruhannya Tidak Efisien. Tahun 2010, tingkat efisiensi ditahun ini sebesar 101,13% (Tidak Efisien). Pada tahun 2011, tingkat efisiensi sebesar 109.92% (Tidak Efisien). Selanjutnya pada tahun 2012, tingkat efisiensi sebesar 102.32% (Tidak Efisien). Lalu pada tahun 2013, tingkat efisiensi sebesar 102.61% (Tidak Efisien). Dan ditahun 2014, tingkat efisiensi sebesar 102.58% (Tidak Efisien).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Dalam periode anggaran belanja 2010-2014 untuk efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung keseluruhannya tidak efektif karena dari setiap program dan anggaran yang direncanakan, banyak program yang terealisasi tapi tidak sesuai anggaran yang direncanakan dan ada juga program yang tidak terealisasi. Sementara untuk tingkat efisiensi anggaran belanja tidak langsung dari periode 2010-2014 tidak efisien, karena keseluruhan dari anggaran belanja tidak langsung tidak dapat mencapai atau bahkan melampaui anggaran yang direncanakan. Dapat diketahui bahwa anggaran belanja sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi sehingga setiap tahun hasilnya akan berbeda-beda.

Saran

Saran yang dapat diberikan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, yaitu: diharapkan dapat meningkatkan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun swasta serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan maupun anggaran agar tercipta keterpaduan, integritas, dan transparansi dalam rangka mewujudkan masyarakat Sulawesi Utara yang berbudaya dan menjadikan Sulawesi Utara menjadi salah satu destinasi pariwisata berdaya saing serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara agar meningkatkan pengawasan kepada pegawai mengenai anggaran belanja yang dikeluarkan agar supaya pengeluarannya bisa teratur sesuai anggaran belanja yang dilakukan setiap tahun peiode berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deddi Nordiawan, Ayuningtyas Hertianti. 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, edisi 2, Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Halim, Abdul. 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Cetakan Ketiga, Salemba Empat, Jakarta
- Hariadi, Pramono, Restianto Yanuar, Bawono, Icuk Rangga. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Julita, 2011, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/209>. Akses tanggal 8 januari 2016.
- Kuncoro. 2009. *Metodologi Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Lomboan, Syurtika 2014, *Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Jurnal EMBA. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5735>. Hal 853-972. Akses tanggal 8 januari 2016.

- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, penerbit ANDI Yogyakarta.
- Mihaiu, Opreana, Cristescu, 2010. *Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector. Romanian Journal of Economic Forecasting – 4/2010*.
- Mongkau, Puspita, 2011. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Skripsi (Tidak Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UNSRAT. Manado.
- Tamasoleng, Adelstin. 2015. Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index/php/jrbm/article/view/7522>. Hal 878-1003. Akses tanggal 8 Januari 2016.
- Wiratna Sujarweni, 2015, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Muttaqinhasyim's 2010. Contoh skripsi (Tugas Akhir) Anggaran Belanja Tidak Langsung (Budget Accounting). www.google.co.id. Akses tanggal 8 Januari 2016.

